



**R E N J A**  
**RENCANA KERJA**  
**TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DINAS KESEHATAN**

**JL.Terantang Belakang Rsud Datu Sanggul Kabupaten Tapin**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subehana Wata'ala telah tersusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin Tahun 2024. untuk acuan pelaksanaan pembangunan Dinas Kesehatan selama satu tahun yang akan datang.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan ini mengacu pada dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin tahun 2024-2026. Rencana Kerja Dinas Kesehatan memberikan pedoman bagi semua unit kerja, pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan secara akuntabel yang berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin keberhasilan program dan kegiatan.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin Tahun 2024 ini.

Rantau, Agustus 2023

Kepala Dinas Kesehatan



Dr. H. Arian Yusuf, SKM, S.Pd, M.Kes  
Pembina Utama Muda

**RENJA 2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana, dan terarah. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun, yang membuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin sebagai unit kerja yang menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang pembangunan kesehatan diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin, maka disusunlah Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan kesehatan SKPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin yang telah ditetapkan.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renja tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indoensia Nomor 4725);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020–2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia tahun 2011 Nomor 310), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011–2015;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin 2005–2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin.
18. Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2019 tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah 2018–2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penulisan dokumen ini adalah untuk melakukan penyusunan Renja SKPD Dinas Kesehatan tahun 2024 Kabupaten Tapin.

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2024 bagi SKPD Dinas Kesehatan, sesuai dengan Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPDP tahun 2024.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan renja 2024, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Bappeda/ Bapelibangda.
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan dinas kesehatan;
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan renja, landasan hukum penyusunan renja, maksud dan tujuan penyusunan renja dan sistematika penulisan dokumen renja.

### **BAB II HASIL DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU**

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN**

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN**

Berisikan uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2022

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Kesehatan Tapin dilaksanakan untuk mengetahui gambaran tingkat pencapaian kinerja yaitu dengan membandingkan pencapaian target kinerja tahun 2022 dengan dan realisasi kinerja. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.101.048.909.046 ,- yang terdiri dari kegiatan:**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan jumlah dana sebesar Rp.35.474.800,-
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan jumlah dana sebesar Rp.35.474.800,-
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah dana sebesar Rp.98.013.186.196,- dengan sub kegiatan
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan jumlah dana sebesar Rp.97.999.206.196,-
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD jumlah dana sebesar Rp.2.850.000,-
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD jumlah dana sebesar Rp.11.130.000,-
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah jumlah dana sebesar Rp.2.190.868.600,- dengan sub kegiatan :
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah dana sebesar Rp.157.954.000,-

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah dana sebesar Rp.45.794.900,-
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan jumlah dana sebesar Rp.22.127.700,-
  - Penyediaan Bahan/Material jumlah dana sebesar Rp.0,-
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah dana sebesar Rp.1.964.992.000,-
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jumlah dana sebesar Rp.184.461.000,- dengan Sub kegiatan :
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya jumlah dana sebesar Rp.184.461.000,-
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah dana sebesar Rp.451.818.400,- dengan Sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah dana sebesar Rp.201.128.400,-
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor jumlah dana sebesar Rp.250.690.000,-
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah dana sebesar Rp. 173.100.050,- dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan jumlah dana sebesar Rp.132.550.050,-
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya jumlah dana sebesar Rp.40.550.000,-

**B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat jumlah dana sebesar Rp. 33.119.157.849,- yang terdiri dari kegiatan :**

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota jumlah dana sebesar Rp. 9.787.049.399,- dengan Sub kegiatan :

- Pembangunan Puskesmas jumlah dana sebesar Rp.10.512.738.000,-
- Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya jumlah dana sebesar Rp. 678.000.000,-
- Pengembangan Puskesmas jumlah dana sebesar Rp. 1.906.736.000,-
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya jumlah dana sebesar Rp. 90.000.000,-
- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dana sebesar Rp. 1.304.464.000,-
- Pengadaan Obat, Vaksin jumlah dana sebesar Rp. 2.819.890.749,-
- Pengadaan Bahan Habis Pakai jumlah dana sebesar Rp.1.318.810.900,-

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah dana sebesar Rp. 23.316.882.550,- dengan sub kegiatan :

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil jumlah dana sebesar Rp. 107.706.400,-
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin jumlah dana sebesar Rp. 163.726.600,-
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir jumlah dana sebesar Rp. 26.840.000,-

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita jumlah dana sebesar Rp. 11.530.000,-
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar jumlah dana sebesar Rp. 105.429.200,-
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif jumlah dana sebesar Rp. 160.415.000,-
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut jumlah dana sebesar Rp. 39.812.200,-
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi jumlah dana sebesar Rp. 24.700.000,-
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus jumlah dana sebesar Rp. 24.700.000,-
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat jumlah dana sebesar Rp. 53.200.000,-
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis jumlah dana sebesar Rp. 91.333.200,-
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV jumlah dana sebesar Rp. 83.139.300,-
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) jumlah dana sebesar Rp. 127.020.000,-
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat jumlah dana sebesar Rp.1.197.931.100,-
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga jumlah dana sebesar Rp.40.140.000,-
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan jumlah dana sebesar Rp.224.149.900,-
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya jumlah dana sebesar Rp.71.400.000,-

- Pengelolaan Surveilans Kesehatan jumlah dana sebesar Rp.96.242.400,-
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) jumlah dana sebesar Rp. 20.800.000,-
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA jumlah dana sebesar Rp.41.075.000,-
- Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan jumlah dana sebesar Rp.93.777.000,-
- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular jumlah dana sebesar Rp. 683.179.200,-
- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat jumlah dana sebesar Rp. Rp.18.609.076.500,-
- Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah jumlah dana sebesar Rp. 25.750.000,-
- Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat jumlah dana sebesar Rp.75.010.000,-
- Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan jumlah dana sebesar Rp. 79.000.000,-
- Operasional Pelayanan Puskesmas jumlah dana sebesar Rp.98.614.750,-
- Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya jumlah dana sebesar Rp.691.184.800,-
- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota jumlah dana sebesar Rp.103.999.992,-
- Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) jumlah dana sebesar Rp. 250.000.000,-

3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi jumlah dana sebesar Rp. 15.225.900,- dengan sub kegiatan :

- Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan jumlah dana sebesar Rp.15.225.900,-

**C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan jumlah dana sebesar Rp. 2.202.839.200,- terdiri dari kegiatan :**

1. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota jumlah dana sebesar Rp.2.038.200.000,- dengan sub kegiatan :

- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar jumlah dana sebesar Rp. 2.038.200.000,-

2. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota` jumlah dana sebesar Rp.164.639.200,- dengan sub kegiatan :

- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah dana sebesar Rp.164.639.200,-

**D. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman jumlah dana sebesar Rp. 32.350.000,- terdiri dari Kegiatan :**

1. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) jumlah dana sebesar Rp. 32.350.000,- dengan sub kegiatan :

- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) jumlah dana sebesar Rp. 32.350.000,-

**E. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan jumlah dana sebesar Rp.551.539.500,- terdiri dari kegiatan :**

1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah dana sebesar Rp. 355.442.200,- dengan kegiatan :
  - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat jumlah dana sebesar Rp. 355.442.200,
2. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah dana sebesar Rp. 196.097.300,- dengan kegiatan :
  - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat jumlah dana sebesar Rp. 196.097.300,-

## 2.2. Realisasi Program dan Kegiatan

Secara umum penyerapan dana masih belum mencapai target (100%), dengan penyerapan per program sebagai berikut:

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota realisasi dana sebesar Rp. 94.146.085.997,-(93,17%) yang terdiri dari kegiatan :**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah terealisasi sebesar Rp. 30.323.500,- (85,48%)
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan jumlah dana sebesar Rp. 30.323.500,- (85,48%)
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan telah terealisasi sebesar Rp. 91.303.264.257,- (93,15%) dengan sub kegiatan :
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan jumlah telah terealisasi sebesar Rp. 91.292.135.457,- (93,16%)
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD jumlah telah terealisasi sebesar Rp. 0,- (00%)
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD jumlah telah terealisasi sebesar Rp.11.128.800 (99,99%)
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah jumlah telah terealisasi sebesar Rp. 2.168.204.050,- (98,97%) dengan sub kegiatan :
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 148.623.900,- (94,09%)
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah dana sebesar Rp.35.517.900 (77,56%)

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 21.498.000,- (97,15%)
  - Penyediaan Bahan/Material jumlah dana terealisasi sebesar Rp.0 (0%)
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 1.962.564.250,- (99,88%)
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 128.947.500,- (69,91%) dengan Sub kegiatan:
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya jumlah dana terealisasi sebesar Rp.128.947.500 (69,91%)
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 383.779.823,- (84,94%) dengan Sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 136.241.823,- (67,74%)
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor jumlah dana terealisasi sebesar Rp.247.538.000,- (98,74%)
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 131.566.867,- (76,01%) dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 111.751.867,- (84,31%)
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 19.815.000,- (48,87%)

**b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 75,109,854,030.00 (73%) yang terdiri dari kegiatan :**

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota jumlah dana terealisasi sebesar Rp.18,940,012,932.00 (74%) dengan Sub kegiatan :

- Pembangunan Puskesmas jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 5,626,017,250.00 (54%)
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 390,109,700.00 (98%)
- Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 4,355,720,184.00 (90%)
- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dana terealisasi sebesar Rp. 1,943,200,112.00 (88%)
- Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 84,695,000.00 (85%)
- Pengadaan Obat, Vaksin jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 3,399,885,406.00 (94%)
- Pengadaan Bahan Habis Pakai jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 3,140,385,280.00 (84%)

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 20.190.285.401,- (86,59%) dengan sub kegiatan :
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 32.956.000,- (30,60%)
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 77.148.000,- (47,12%)
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 8.212.000,- (30,60%)
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 9.430.000,- (81,79%)
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 102.646.000,- (97,36%)
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 133.970.000,- (83,51%)
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 36.899.900,- (92,68%)
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 24.700.000,- (100%)
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 24.700.000,- (100%)
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 49.900.000,- (93,80%)

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 46.126.400,- (50,50%)
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 58.964.000,- (70,92%)
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 26.848.800,- (21,14%)
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat jumlah dana sebesar Rp. 774.131.542,- (64,62%)
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 30.002.000,- (74,74%)
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 150.616.000,- (67,19%)
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 70.980.000,- (99,41%)
- Pengelolaan Surveilans Kesehatan jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 73.912.400,- (76,80%)
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) jumlah dana terealisasi sebesar Rp.17.200.000,- (82,69%)
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 37.775.000,- (91,97%)

- Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan jumlah dana terealisasi sebesar Rp.37.077.000,- (39,54%)
  - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 367.113.600,- (53,74%)
  - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 16.957.588.410,- (91,13%)
  - Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 19.650.000 (76,31%)
  - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 74.735.000,- (99,63%)
  - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 58.162.000,- (73,62%)
  - Operasional Pelayanan Puskesmas jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 48.578.579,- (49,26%)
  - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 644.087.200,- (93,19%)
  - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) jumlah dana terealisasi sebesar Rp.196.175.570,- (78,47%)
3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi jumlah dana terealisasi sebesar Rp.8.360.000,- (54,91%) dengan sub kegiatan :

- Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 8.360.000,- (54,91%)
- c. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan** jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 2.154.576.846,- (97,81%) terdiri dari kegiatan :
1. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 2.000.400.000,- (98,15%) dengan sub kegiatan :
    - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 2.000.400.000,- (98,15%)
  2. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 154.176.846,- (93,65%) dengan sub kegiatan :
    - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 154.176.846,- (93,65%)
- d. **Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman** jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 12.722.335,- (39,33%) terdiri dari Kegiatan :

1. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 12.722.335,- (39,33%) dengan sub kegiatan :

- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 12.722.335,- (39,33%)

**e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 392.481.900,- (71,16%) terdiri dari kegiatan :**

1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 214.351.900,- (60,31%) dengan kegiatan :

- Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat jumlah dana terealisasi sebesar Rp.214.351.900,- (60,31%)

2. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah dana terealisasi sebesar Rp.178.130.000,- (90,84%) dengan kegiatan :

- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat jumlah dana terealisasi sebesar Rp.178.130.000,- (90,84%)

**2.2 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan:**

-

**2.3 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kesehatan**

-

**2.4 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:**

-



	X.XX.01.2.09.01 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			132.550.050			7.204.984			17.815.616			12	Bulan	86.731.267	12	0	111.751.867	#DIV/0!	84,31	12	0	111.751.867	#DIV/0!	84,31			
	X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			40.550.000			-			10.025.000			12	Bulan	9.790.000	12	0	19.815.000	#DIV/0!	48,87	12	0	19.815.000	#DIV/0!	48,87			
																			Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)	#DIV/0!	66,59								
																			Predikat Kinerja Sub Kegiatan	#DIV/0!	#REF!								
																			Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	#DIV/0!	87,71								
																			Predikat Kinerja Kegiatan	#DIV/0!	#REF!								
	X.XX.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		100	%	41.712.748.099	15,73	%	4.074.133.220			7.445.074.839			722.569.000					27.589.286.604	15,73	%	39.832.933.663	15,73	95,49	15,73	%	39.832.933.663	15,73	95,49
	X.XX.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100	%	18.630.639.649	15,73	%	12.393.000			2.730.635.000								16.977.204.332	15,73	%	19.720.232.332	15,73	105,85	15,73	%	19.720.232.332	15,73	105,85
	X.XX.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun			10.512.738.000			-			-			2	Puskesmas	5.626.017.250	0	0	5.626.017.250	#DIV/0!	53,52	0	0	5.626.017.250	#DIV/0!	53,52			
	X.XX.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun			678.000.000			-			-			12	Bulan	390.109.700	12	0	390.109.700	#DIV/0!	57,54	12	0	390.109.700	#DIV/0!	57,54			
	X.XX.02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM			1.906.736.000			-			-			12	Bulan	390.109.700	12	0	390.109.700	#DIV/0!	20,46	12	0	390.109.700	#DIV/0!	20,46			



	X.XX.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	13	Puskesmas	20.800.000	13	puskesmas	-	13	puskesmas	13.600.000			13	Puskesmas	3.600.000	13	puskesmas	17.200.000	100	82,69	11	puskesmas	17.200.000	100	82,69	
	X.XX.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa NAPZA	Jumlah Penyelenggara NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	13	Puskesmas	41.075.000	0		-	0		28.975.000			-	13	Puskesmas	8.800.000	0	0	37.775.000	0	91,97	0	0	37.775.000	0	91,97
	X.XX.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			93.777.000			-			-			13	Puskesmas	37.077.000	0	0	37.077.000	#DIV/0!	39,54	0	0	37.077.000	#DIV/0!	39,54	
	X.XX.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	73	Dokumen	683.179.200			-	10	Dokumen	37.375.000			13	Puskesmas	329.738.600	0	0	367.113.600	0	53,74	0	0	367.113.600	0	53,74	
	X.XX.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			18.609.076.500		3.992.475.220				4.038.284.140			13	Puskesmas	8.926.829.050	0	0	16.957.588.410	#DIV/0!	91,13	0	0	16.957.588.410	#DIV/0!	91,13	
	X.XX.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	2	Puskesmas	25.750.000	0		-	0		13.600.000			-	13	Puskesmas	6.050.000	0	0	19.650.000	0	76,31	0	0	19.650.000	0	76,31
	X.XX.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	15	Dokumen	75.010.000	2	Dokumen	6.675.000	6	Dokumen	24.475.000			-	13	Puskesmas	43.585.000	2	Dokumen	74.735.000	13.3333	99,63	0	0	74.735.000	13.3333	99,63



## 2.5. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2022

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan melaksanakan misi Bupati Kabupaten Tapin yang Kedua yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Dengan Ditopang Nilai-Nilai Agamis dan Kultur Budaya Daerah, dan misi Keempat yaitu Membangun Infrasturktur Daerah yang Terintegrasi Dengan Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Lokal.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin sampai dengan tahun 2021, mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diatas serta dalam rangka mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Target dalam Renstra Dinas Kesehatan :

Nama Indikator	SASARAN	REALISASI TRIWULAN 1	REALISASI TRIWULAN 2	REALISASI TRIWULAN 3	REALISASI TRIWULAN 4
Pelayanan kesehatan ibu hamil	3395	21%	40%	55.9% (1897)	87.1% (2958)
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	3240	18%	36%	51% (1650)	79% (2553)
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	3086	21.9 %	44.5%	71.4% (2205)	95.4% (2946)
Pelayanan kesehatan balita	15.505	23.3 %	49%	81.8% (12.687)	98.8% (15.319)
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	64.252	7.2 %	Tidak ada pemeriksaan, pada tahun ajaran baru	17.6% (11.348)	35.9% (23.096)

Pelayanan kesehatan pada usia produktif	127.181	7.92 %	12.5%	17.8% (22.731)	23.1% (29.484)
Pelayanan kesehatan pada usia Lanjut	32.560	12.5 %	26%	28 % (8617)	48% (14.668)
Pelayanan kesehatan pada Hipertensi	61.445	6%	9.2%	13.1% (8084)	16.4% (10.126)
Pelayanan kesehatan penderita	3065	29.8 %	35.9%	67.7%	78.5%

## 2.6. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Kinerja Dinas Kesehatan sampai dengan tahun 2022 belum sepenuhnya tercapai sebagaimana target yang diharapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan data dan informasi yaitu pengumpulan data masih dilakukan secara manual dan kesadaran SDM dalam melaporkan data dan informasi masih rendah.
2. Perencanaan yang disusun belum berkualitas karena perencanaan yang dilakukan hanya mengikuti besaran anggaran yang disediakan, belum mengarah ke pencapaian SPM Bidang Kesehatan. Dalam menentukan kebijakan perencanaan dan penganggaran, ada intervensi besar dari pihak pemda yaitu DPR dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
3. SDM di Dinkes Kab. Tapin secara kuantitas masih belum mencukupi dan kompetensi SDM nya belum maksimal, hal ini berkaitan dengan anggaran kegiatan peningkatan SDM terkonsentrasi pada BKD yang tidak ada anggaran khusus untuk menunjang peningkatan kompetensi pada Dinas Kesehatan.
4. Belum ada keterlibatan lintas sektor dalam perencanaan, namun sektor lain seperti pemerintah desa dan dinas-dinas lain yang terkait cukup mendukung

dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, implementasi PIS-PK, dan juga menangani masalah kesehatan.

Berdasarkan uraian di atas, jika tidak segera di tangani maka akan berdampak pada terhambatnya pencapaian kinerja sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu diperlukan formulasi isu penting berupa inovasi serta koordinasi lintas program dan lintas sektor agar dapat mengoptimalkan pelayanan Dinas Kesehatan, antara lain:

1. Pengelolaan pencatatan dan pelaporan yang lebih optimal melibatkan tidak hanya unsur Pemerintahan namun juga sector swasta
2. Sinergitas lintas program di internal Dinas Kesehatan dan Puskesmas
3. Sinergitas lintas sektor, baik antar Perangkat Daerah, maupun stakeholder mitra kesehatan, pihak swasta dan masyarakat
4. Optimalisasi SIK dalam rangka peningkatan manajemen pelayanan kesehatan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan
5. Penguatan Tim Pembina Puskesmas serta Tim Pengawas Peraturan Daerah bidang kesehatan

## **2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin tahun 2024 merupakan penggabungan usulan dari hasil Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota serta pelaksanaan Forum Dinas Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin yang diselaraskan dengan Dokumen Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 serta disesuaikan dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten untuk mencapai target sasaran RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023. Ada beberapa usulan dari masyarakat, stakeholder kesehatan melalui musrembang maupun Forum Perangkat Daerah, antara lain:

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot
2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot
3. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot

Usulan-usulan tersebut direkapitulasi dan dibahas pada rapat internal dalam pembahasan renja OPD sebelum dipaparkan pada Forum Renja Dinas Kesehatan dengan mengundang unsur DPRD, stakeholder dan seluruh OPD terkait untuk memberikan masukan atas usulan-usulan kegiatan Sekretariat Daerah dengan tetap memperhatikan ketercapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2018-2023.

Berikut adalah usulan Program/Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2022:

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Salam Babaris Piani	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	2	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN**

#### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI**

##### **a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2024 yang terkait dengan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara,
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan,
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia,
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bias maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya,
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,

8. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

salah satunya memiliki tema pokok maupun fokus pada pengembangan wilayah Kalimantan baik sebagai bagian dari Indonesia dengan pengelolaan potensi sumber daya alamnya maupun sebagai bagian dari internasional dengan hutan tropisnya sebagai paru-paru dunia.

Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terluas yang dimiliki Negara Indonesia yang terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia sehingga memiliki posisi geografis yang strategis. Selain itu, sumber daya alam yang dimiliki Pulau Kalimantan menjadikan pulau Kalimantan memiliki posisi yang strategis baik pada koridor nasional, regional ASEAN, hingga global atau internasional. Dalam koridor nasional, wilayah Kalimantan memiliki peranan sebagai pengekspor batubara di beberapa Negara ASEAN dan juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan perkebunan sawit pada level nasional maupun ASEAN. Sedangkan pada level internasional, selain sebagai paru-paru dunia juga Kalimantan merupakan salah satu penghasil sumber daya mineral yang tinggi sebagai sumber energy kehidupan manusia saat ini.

Pada perencanaan pembangunan nasional periode ini, tema pengembangan wilayah regional Kalimantan yang diusung adalah:

1. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan system pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir;
2. Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batubara, termasuk pengembangan energy baru terbarukan berbasis

biomasa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi;

3. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa; dan
4. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Tujuan pengembangan wilayah Pulau Kalimantan tahun 2018–2023 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan pada keunggulan dan potensi daerahnya masing-masing, melalui:

1. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa;
2. Penyediaan infrastruktur wilayah;
3. Peningkatan SDM serta ilmu dan teknologi secara terus menerus

#### **b. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi**

Berdasarkan hasil analisis yang mengiringi pembangunan provinsi Kalimantan Selatan selama ini, isu pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi, maka dapat dirumuskan telaahan kebijakan provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang berpotensi memberikan akselerasi capaian pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Sustainability Development sebagai focus pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan
2. Akselerasi pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
3. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah

4. Shifting struktur perekonomian daerah
5. Perwujudan democratic governance melalui reformasi birokrasi
6. Ketahanan Pangan
7. Ketahanan Energi
8. Degradasi kuantitas dan kualitas lingkungan
9. Bonus Demografi
10. Implementasi SPM dalam pelayanan public

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KESEHATAN TAPIN**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rencana capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran serta target indikator sasaran pada tahun 2024 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada Tabel. T-III.1 berikut ini:

## Target Indikator Kinerja Dinas Kesehatan

### 1. Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET INDIKATOR KINERJA PADA TAHUN	
		TAHUN 2024	Kondisi akhir Priode
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Menurunnya Angka kesakitan	9,19	
	Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	183/100.000 Kerlahiran Hidup	
	Angka Kematian Bayi Per 1.000 KH	13/1000 Kerlahiran Hidup	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	80 %	

### 2. Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan

INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA PADA TAHUN	
	TAHUN 2024	Kondisi akhir Priode
Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	
Pelayanan kesehatan balita	100	
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	
Pelayanan kesehatan pada usia Produktif	100	
Pelayanan kesehatan pada usia Lanjut	100	
Pelayanan kesehatan pada Hipertensi	100	
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	

jiwa sesuai standar		
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis"	100	
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)"	100	

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN**

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan dan RKPD Kabupaten Tapin tahun 2024 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Rencana kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Kesehatan, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Kesehatan maupun di lingkup daerah.

Program adalah penjabaran kebijakan daerah dalam bentuk upaya yang mengisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Kesehatan tahun 2024 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai kewenangan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Awal PD). Sasaran Dinas Kesehatan berdasarkan arah kebijakan tahun 2024 dalam RPJMD adalah meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat dengan strategi meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam hidup sehat. Untuk mencapai sasaran tersebut, program prioritas Dinas

Kesehatan tahun 2024 .

#### PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin yang direncanakan untuk periode tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ;

**FINAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						114.979.674.318,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						114.979.674.318,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						75.319.585.738,00							0,00	Dinas Kesehatan
			<i>Persentase ASN dengan capaian kinerja &amp;90% (%)</i>				100									
			<i>Persentase efisiensi penggunaan anggaran dinas Kesehatan (%)</i>				100									
			<i>Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat dinas kesehatan (%)</i>				100									
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.025.063.472,00							-	Dinas Kesehatan
			<i>Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Dengan Satuan:dokumen) (Dokumen)</i>				4		(KAB. TAPIN)					4		
			<i>Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappellitbang (Dengan Satuan:dokumen) (Dokumen)</i>				1		(KAB. TAPIN)					1		
			<i>Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu (Dengan Satuan:Persen) (%)</i>				100		(KAB. TAPIN)					100		
			<i>persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti dinkes (Dengan Satuan:Persen) (%)</i>				100		(KAB. TAPIN)					100		
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>		1	1	1	15.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1		
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						838.135.600,00							-	Dinas Kesehatan
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</i>		1	1	1	838.135.600,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		asn		1		
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						4.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)</i>		1	1	1	4.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN		1		
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						10.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)</i>		1	1	1	10.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1		
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						5.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)</i>		1	1	1	5.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN		1		
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						148.927.872,00							-	Dinas Kesehatan

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		1	1	1	148.927.872,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN	1			
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		2	2	2	4.000.000,00	(tapin, KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		laporan	2		-	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (Dengan Satuan:persen) (%)				100		(KAB. TAPIN)				100			Dinas Kesehatan
			Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar dinkes (Dengan Satuan:Persen) (%)				100		(KAB. TAPIN)				100			
			Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar dinkes (Dengan Satuan:Persen) (%)				100		(KAB. TAPIN)				100			
			Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan dinkes (Dengan Satuan:Persen) (%)				100		(KAB. TAPIN)				100			
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		482	482	482	71.117.920.161,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			482		-	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		1	1	1	20.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1		-	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		1	1	1	2.832.500,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1		-	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		1	1	1	11.330.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1		-	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen) (%)				100		(KAB. TAPIN)				100			Dinas Kesehatan
1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		1	1	1	4.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1		-	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN (Dengan Satuan:persen) (%)				100		(KAB. TAPIN)				100			Dinas Kesehatan
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		1	1	1	5.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1		-	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		1	1	1	5.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1		-	Dinas Kesehatan

1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>persentasi pelayanan sekretariat (Dengan Satuan:persen) (%)</i> <i>Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat dinkes (Dengan Satuan:Persen) (%)</i>				100	2.147.693.444,00	(KAB. TAPIN)					100	-	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	0	0			3.000.000,00	(KAB. TAPIN)				Tapin	100	-	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	1	1	1		132.000.000,00	(KAB. TAPIN)					1	-	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)</i>	1	1	1		10.000.000,00	(KAB. TAPIN)					1	-	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	1	1	1		155.000.000,00	(KAB. TAPIN)					1	-	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>	1	1	1		17.693.444,00	(KAB. TAPIN)					1	-	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)</i>	0	0			3.000.000,00	(KAB. TAPIN)				Tapin		-	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)</i>	1	1	1		10.000.000,00	(KAB. TAPIN)					1	-	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	1	1	1		1.817.000.000,00	(KAB. TAPIN)				Tapin	1	-	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>persentasi kepuasan pegawai terhadap pelayanan sekretariat (Dengan Satuan:persen) (%)</i>				100	696.000.000,00	(KAB. TAPIN)					100	-	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	1	1	1		365.000.000,00	(KAB. TAPIN)					1	-	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	1	1	1		15.000.000,00	(KAB. TAPIN)					1	-	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	1	1	1		316.000.000,00	(KAB. TAPIN)					1	-	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentasi Pemeliharaan Barang milik daerah (Dengan Satuan:unit) (Unit)</i>				50	155.048.661,00	(KAB. TAPIN)					50	-	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						97.268.661,00	(KAB. TAPIN)						-	Dinas Kesehatan

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		50	50	50	97.268.661,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50			
1.02.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar							40.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)		1	1	1	40.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tapin		1			
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							17.780.000,00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		36	36	36	17.780.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							129.697.500,00	(KAB. TAPIN)				30		-	Dinas Kesehatan
			persentasi puskesmas yang BLUD (Dengan Satuan:persen) (%)				15									
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							129.697.500,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemerataan kualitas layanan dan sarana prasarana kesehatan			-	Dinas Kesehatan
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		13	13	13	129.697.500,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kabupaten Tapin		13			
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						36.512.163.430,00							0,00	Dinas Kesehatan
			Persentase pelayanan tidak menular dan menular (hepatitis, cacangan, malaria, kusta, ispa, dan DBD) (%)				100									
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar (%)				100									
			Persentasi Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Meilitus (Dm) (%)				100									
			Persentasi Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%)				100									
			Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi Hiv Yang Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini Hiv Sesuai Standar (%)				100									
			Persentase Orang Terduga Tbc Yang Mendapatkan Pelayanan Tbc Sesuai Standar (%)				100									
			Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)				100									
			Persentase balita yang berstatus gizi baik (%)				82									
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar (%)				100									
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar (%)				100									
			Persentase usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)				100									
			Persentase puskesmas yang memiliki alat kesehatan dan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar (%)				100									
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)				100									
			Persentase puskesmas yang terakreditasi utama (%)				23									



1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					150.599.804,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				-	Dinas Kesehatan
		<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)</i>	1	1	1	150.599.804,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1		
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan					650.000.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				-	Dinas Kesehatan
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)</i>	1	1	1	650.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1		
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					10.000.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				-	Dinas Kesehatan
		<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)</i>	1	1	1	10.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1		
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					410.000.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				-	Dinas Kesehatan
		<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)</i>	1	1	1	410.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1		
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					2.145.000.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				-	Dinas Kesehatan
		<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)</i>	1	1	1	2.145.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					11.561.893.626,00								-	Dinas Kesehatan
		<i>Persentase Desa yang memiliki Posbindu PTM aktif (Dengan Satuan:Persen) (%)</i>			92		(KAB. TAPIN)						93		
		<i>Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap meliputi Hb0, BCG, 4 Dosis Polio, 3 Dosis DPT-HB (DPT-Hib), serta dosis campak selama waktu 1 tahun (Dengan Satuan:Persen) (%)</i>			90		(KAB. TAPIN)						92.5		
		<i>Persentase ketepatan laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Penyakit (Dengan Satuan:Persen) (%)</i>			100		(KAB. TAPIN)						100		
		<i>Persentase Kelengkapan Laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Penyakit (Dengan Satuan:Persen) (%)</i>			100		(KAB. TAPIN)						100		
		<i>Persentasi pelayanan kesehatan pada usia lanjut (Dengan Satuan:persen) (%)</i>			100		(KAB. TAPIN)						100		
		<i>Persentasi pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar (Dengan Satuan:persen) (%)</i>			100		(KAB. TAPIN)						100		
		<i>Persentase penduduk yang dilakukan deteksi dini gangguan indera (Dengan Satuan:Persen) (%)</i>			87		(KAB. TAPIN)						88		
		<i>Persentase deteksi dini penyakit kanker (Dengan Satuan:Persen) (%)</i>			2.7		(KAB. TAPIN)						2.8		
		<i>Persentase FKTP yang melakukan PANDU PTM (Dengan Satuan:Persen) (%)</i>			23		(KAB. TAPIN)						30		

		Persentase penduduk usia 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan skrining (Dengan Satuan:Persen) (%)			6			(KAB. TAPIN)				7		
		Persentase penyandang gangguan jiwa yang memperoleh layanan di Fasyankes (Dengan Satuan:Persen) (%)			92			(KAB. TAPIN)				93		
		Cakupan Treatment Coverage TB/ Penemuan Kasus TB (Dengan Satuan:Persen) (%)			95			(KAB. TAPIN)				95		
		persentasi penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medik (Dengan Satuan:Persen) (%)			60			(KAB. TAPIN)				70		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA (Dengan Satuan:Persen) (%)			30			(KAB. TAPIN)				38		
		Persentasi penduduk Kabupaten Tapin masuk dalam kepesertaan BPJS pada segmentasi PBI APBD (Dengan Satuan:Orang) (Orang)			51300			(KAB. TAPIN)				56990		
		Odhiv baru memulai pengobatan (Dengan Satuan:Persen) (%)			85			(KAB. TAPIN)				85		
		Cakupan Pemberian obat Pencegahan Massal (POPM) Cacingan (Dengan Satuan:Persen) (%)			75			(KAB. TAPIN)				75		
		Cakupan Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) (Dengan Satuan:Persen) (%)			100			(KAB. TAPIN)				100		
		Persentase Pemberian pengobatan ACT Malaria (Dengan Satuan:Persen) (%)			100			(KAB. TAPIN)				100		
		Angka kesembuhan RFT Kusta (Dengan Satuan:Persen) (%)			90			(KAB. TAPIN)				90		
		Cakupan penemuan kasus Pneumonia Balita (Dengan Satuan:Persen) (%)			80			(KAB. TAPIN)				80		
		Angka Bebas Jentik (ABJ) (Dengan Satuan:Persen) (%)			95			(KAB. TAPIN)				95		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					180.841.662,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			-	Dinas Kesehatan
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3395	3395	3395	180.841.662,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3395		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					3.000.000,00							-	Dinas Kesehatan
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1	1	1	3.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1		
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					23.398.558,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			-	Dinas Kesehatan
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3086	3086	3086	23.398.558,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3086		
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					40.319.438,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			-	Dinas Kesehatan
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	15505	15505	15505	40.319.438,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15505		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					91.759.482,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			-	Dinas Kesehatan

		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		8033	8033	8033	91.759.482,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	8033		
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						55.833.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				- Dinas Kesehatan
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		127181	127181	127181	55.833.800,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	127181		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						18.697.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			Tapin	- Dinas Kesehatan
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		3256	3256	3256	18.697.800,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tapin	3256		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						7.632.240,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			Tapin	- Dinas Kesehatan
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		61445	61445	61445	7.632.240,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tapin	61445		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						7.632.240,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			Tapin	- Dinas Kesehatan
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		3065	3065	3065	7.632.240,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tapin	3065		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						22.632.240,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			Tapin	- Dinas Kesehatan
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		262	262	262	22.632.240,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tapin	262		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						56.195.326,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			Tapin	- Dinas Kesehatan
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		3242	3242	3242	56.195.326,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tapin	3242		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						27.946.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			Tapin	- Dinas Kesehatan
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		0.00	1	1	27.946.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tapin	1		
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						10.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			Tapin	- Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)		0.00	1	1	10.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tapin	1		
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						5.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			Tapin	- Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)		0.00	1	1	5.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tapin	1		

1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					231.000.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				-	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0.00	1	1	231.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tapin	1				
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					39.794.880,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				-	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0.00	1	1	39.794.880,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tapin	1				
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					159.000.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				-	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0.00	1	1	159.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tapin	1				
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					5.000.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				-	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	1	1	5.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	1				
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					5.000.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				-	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1	1	1	5.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	1				
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					34.235.300,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				-	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1	1	34.235.300,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	1				
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					2.151.500,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				-	Dinas Kesehatan
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	262	262	262	2.151.500,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	262				
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					2.151.500,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				-	Dinas Kesehatan
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	300	300	300	2.151.500,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	300				
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan					3.000.000,00								-	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1	1	1	3.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	1				
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					154.000.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				-	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	73	73	73	154.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	73				
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					9.654.947.708,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				-	Dinas Kesehatan

		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)		1	1	1	9.654.947.708,00	(Puskesmas Binuang, Binuang, Kec. Binuang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		masyarakat candi Laras Utara, masyarakat Kecamatan Bakarangan, Masyarakat kecamatan kecamatan Binuang, Masyarakat Kecamatan Kecamatan Bungur, Masyarakat Kecamatan Kecamatan Candi Laras Selatan, Masyarakat Kecamatan Kecamatan Hatungun, Masyarakat Kecamatan Kecamatan Lokpaikat, Masyarakat Kecamatan Kecamatan Piani, Masyarakat Kecamatan Kecamatan Salam Babaris, Masyarakat Kecamatan Kecamatan Tapin Selatan, Masyarakat Kecamatan Kecamatan Tapin Tengah, Masyarakat Kecamatan Kecamatan Tapin Utara	1		
1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah						1.968.440,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				Dinas Kesehatan
		Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)		350	350	350	1.968.440,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	350		
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						59.782.444,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)		15	15	15	59.782.444,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	15		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						18.973.068,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		1	1	1	18.973.068,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	1		
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						360.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)		1	1	1	360.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		masyarakat dan iifk, pkm	1		
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						10.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				Dinas Kesehatan
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)		13	13	13	10.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	13		
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						5.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)		1	1	1	5.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1		
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						250.000.000,00							Dinas Kesehatan
		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)		100	100	100	250.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat kabupaten Tapin	100		

1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1	1	1	3.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1	-	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1	1	1	3.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ODHIV	1	-	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1	1	1	3.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1	-	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1	3.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1	-	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan (Dokumen)	1	1	1	3.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1	-	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Perentase kelengkapan laporan (Dengan Satuan:100) (%)			100	44.670.000,00	(KAB. TAPIN)			100	-	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	1	44.670.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1	-	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (Dengan Satuan:unit) (Unit)			1	10.000.000,00	(KAB. TAPIN)			1	-	Dinas Kesehatan
		Persentase pemenuhan standar mutu fasilitas kesehatan (Dengan Satuan:Persen) (%)			100		(KAB. TAPIN)			100	-	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1	1	1	5.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1	-	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1	1	1	5.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1	-	Dinas Kesehatan
3.	1.02.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>			100	2.495.925.150,00					0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			100	2.440.000.000,00	(KAB. TAPIN)				100	Dinas Kesehatan
		Persentase Teanga kesehatan yang terpenuhi (Dengan Satuan:persen) (%)			100							Dinas Kesehatan

1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						2.440.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				-	Dinas Kesehatan
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		220	220	220	2.440.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				220		
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						55.925.150,00								Dinas Kesehatan
		Persentase puskesmas yang memiliki 9 jenis nakes strategis (Dengan Satuan:persen) (%)				100		(KAB. TAPIN)					100		
		Persentasi puskesmas memiliki dokter umum dan dokter gigi (Dengan Satuan:persen) (%)				100		(KAB. TAPIN)					100		
		Persentasi nakes yang memiliki STR aktif (Dengan Satuan:persen) (%)				100		(KAB. TAPIN)					100		
		Persentasi rumah sakit memiliki 4 spesialis dasar dan 3 penunjang (Dengan Satuan:Persen) (%)				100		(KAB. TAPIN)					100		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan indikator nasional mutu (INM) (Dengan Satuan:Persen) (%)				100		(KAB. TAPIN)					100		
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						55.925.150,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				-	Dinas Kesehatan
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)		50	50	50	55.925.150,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50		
4.	1.02.04	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>					<b>217.000.000,00</b>							<b>0,00</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>
		<b>Persentase puskesmas yang memiliki alat kesehatan dan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar (%)</b>				<b>100</b>									
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						217.000.000,00								Dinas Kesehatan
		Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Toko Obat, UMOT, UJG, dan UJR) yang memenuhi ketentuan perizinan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen) (%)				100		(KAB. TAPIN)					100		
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						217.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing					Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)		1	1	1	217.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1		
5.	1.02.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>					<b>435.000.000,00</b>							<b>0,00</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>
		<b>Persentase rumah tangga penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS) (%)</b>				<b>69</b>									
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						276.000.000,00								Dinas Kesehatan
		Persentasi puskesmas memiliki pangkalan SBH (Dengan Satuan:Persen) (%)				100		(KAB. TAPIN)					100		
		Persentase Posyandu Aktif (Dengan Satuan:Persen) (%)				100		(KAB. TAPIN)					100		

			Persentasi Media yang di rencanakan (Dengan Satuan:Persen) (%)				100		(KAB. TAPIN)				100			
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat							276.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			-	Dinas Kesehatan	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1	1	1		276.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1			
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentasi cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di desa (Dengan Satuan:persen) (%)				100		(KAB. TAPIN)				100		Dinas Kesehatan	
			Persentasi DESA PHBS (Dengan Satuan:Persen) (%)				69		(KAB. TAPIN)				70.5			
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat							154.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			-	Dinas Kesehatan	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1	1	1		154.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1			
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							5.000.000,00							Dinas Kesehatan	
			Persentase Kader Kesehatan yang mendapatkan Bimbingan teknis (Dengan Satuan:Persen) (%)				100		(KAB. TAPIN)				100			
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							5.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			-	Dinas Kesehatan	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	2	2	2		5.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2			
<b>J U M L A H</b>								<b>114.979.674.318,00</b>								-

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin tahun 2024 ini merupakan dokumen Perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Kesehatan dan RKPD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh sasaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki SKPD Dinas Kesehatan, Penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi baik diinternal SKPD Dinas Kesehatan.

Akhirnya dengan tersusunya Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD .

BUPATI TAPIN

M.ARIFIN ARPAN